

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adji, Indriyanto Seno, 2009, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta: CV Diadit Media.
- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- _____, 2012, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli, 2002, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Jakarta: BPHN.
- _____, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Internasional*, Jakarta: BPHN.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2012.
- Basah, Sjachran. 1997. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Darto, M., 2010, *Administrasi Publik Kontemporer*, Yogyakarta: Gava Media.
- Effendy, Marwan, 2013, *Tipikor dan Pengadilan Tipikor*, Jakarta: Referensi.
- Forsyth, C.F. dan H.W.R. Wade, 2014, *Administrative Law*, 11th ed., Oxford: Oxford University Press.
- Hadjon, Philipus M., 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Edisi Revisi/Terbaru), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, Andi, 2017, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- _____, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- HR, Ridwan, 2018, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Indroharto, 2000, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kelsen, Hans, 1945, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press.
- Manan, B., 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sapardjaja, Komariah Emong. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 2002.
- Sedarmayanti, 2003, *Good Governance: Kepemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah dan Upaya Meningkatkan Kinerja Pemerintahan*, Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

B. JURNAL ILMIAH (NASIONAL DAN INTERNASIONAL)

- Aji, A.D., 2023, “Relasi Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Renaissance*, Vol. 8, No. 1, hal: 52–58.
- _____, 2024, “Analisis yuridis hukum pidana dan hukum administrasi dalam perkara tindak pidana korupsi: perspektif critical legal studies”, *Lex Renaissance*, Vol. 9, No. 2, hal: 309–332.
- Effendy, M., 2011, “Kriminalisasi Kebijakan dan Hukum Pidana”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8, No. 3, hal: 418–423.
- Effendy, M., 2011, “Kriminalisasi Kebijakan dan Hukum Pidana”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8, No. 3.

- Hiariej, Eddy O.S., 2011, “Asas Kesalahan dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 3, hal: 427–430.
- HR, Ridwan, 2010, “Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 17, No. 3, hal: 402–420.
- Manao, D.F., 2018, “Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan dalam perspektif hukum administrasi negara”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 2, No. 1, hal: 85–92.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Kriminal”, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 1, No. 1, hal: 13–17.
- Muladi, 2002, “Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 9, No. 21, hal: 5–15.
- Supandi, 2017, “Batasan Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 2, hal: 210–225.
- _____, 2017, “Batas Administratif dan Pidana dalam Penyalahgunaan Wewenang”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24, No. 2, hal: 266–270.
- Wibowo, A., 2020, “Penentuan kriteria unsur penyalahgunaan wewenang dalam perkara tindak pidana korupsi (Studi putusan pengadilan)”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 1, hal: 41–148.
- Wiratraman, H.P., 2014, “Relasi Hukum Administrasi Negara dan Tindak Pidana Korupsi”, *Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 3, hal: 401–415.
- Yuspar & Fahmiron, 2025, “Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi (kajian kasus tersangka Tom Lembong)”, *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 4, hal: 12–14.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572 K/Pid/2003.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 21 K/Pid.Sus/2010.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2149 K/Pid.Sus/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 63/PUU-XV/2017.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 2/P/PW/2017/PTUN.JBI.

Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby,